

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat PDI-P dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1999. PDI-P merupakan partai politik yang memiliki tali kesejarahan dengan partai politik pada masa Orde lama. PDI-P adalah kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973.

Sejarah dibentuknya PDI-P merupakan hasil fusi dari (5) lima partai politik yaitu: Partai Nasional Indonesia (PAN), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba. Kelima partai tersebut membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan pada tanggal 9 Maret 1970 yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama pada tanggal 28 Oktober 1971. Pada perkembangan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1973 Kelompok Demokrasi Pembangunan tersebut melakukan langkah strategis, yaitu memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila yaitu dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, dan menyatakan pengakhiran terhadap eksistensi masing-masing.

Proses lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996 yaitu peristiwa dimana terjadinya perebutan kantor DPP PDI di jalan

Dipnegoro no. 58 Jakarta Pusat oleh ratusan orang berkaos merah. Meskipun kantor DPP PDI tersebut berhasil direbut, namun peristiwa ini justru telah berhasil menampilkan Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Meskipun sebelum peristiwa ini terjadi Megawati tercatat sebagai Ketua Umum PDI dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah namanya dikenal diseluruh Indonesia.

Paska peristiwa 27 Juli tersebut, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui pesan hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah kepemimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Dan PDI yang mengikuti Pemilu 1997 adalah PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hanya mampu meraih 11 (sebelas) kursi DPR karena perolehan suara yang merosot tajam.

PDI dibawah kepemimpinan Megawati mendapatkan angin segar pada tahun 1998, karena pada saat itu merupakan peristiwa lengsernya Presiden Soeharto yang berarti juga berakhirnya rezim Orba, sehingga pengekangan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati atas kekuasaan Orba berakhir pula. Disamping itu dukungan masyarakat terhadap PDI dibawah kepimpinan Megawati menjadi semakin kuat dan kian berkibar, sehingga besarnya keinginan masyarakat dan juga PDI dibawah kepemimpinan Megawati untuk melakukan reformasi politik semakin

Dalam perkembangan selanjutnya, didorong oleh perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres ke-5 Partai demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan asa Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial sebagai jati diri partai, serta gotong royong, demokratis, merdeka dan pantang menyerah sebagai watak partai. Pengubahan nama sekaligus pendirian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini bertepatan dengan saat dimana telah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie untuk menyongsong Pemilu 1999.

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI-P melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis dan berdasarkan pancasila serta undang-undang yang berlaku.

Sedikit berbicara prestasi PDI-P pada Pemilu 1999, PDI-P memperoleh suara yang tinggi dan menempati posisi pertama dalam jumlah perolehan suaranya, sekaligus sebagai partai pemenang dalam pemilu. Perolehan suara PDI-P untuk Pemilu legislatif di tahun 1999 tersebut adalah PDI-P memperoleh peringkat pertama dengan perolehan 151 kursi di parlemen. Meski demikian, PDI-P gagal membawa Megawati menduduki kursi

Umum MPR 1999. Namun demikian, Megawati ditetapkan untuk menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan Presiden pada tahun 2001, barulah PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi Presiden untuk menggantikan sekaligus melanjutkan pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid yang belum habis masa jabatannya namun terpaksa turun dari kursi kepresidenan.

Akan tetapi pada Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun keperingkat kedua dengan hanya memperoleh 109 kursi. Untuk Pemilu Presiden 2004 PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden berpasangan dengan KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Namun hasil pemilu dimenangkan oleh SBY-JK dari partai Demokrat yang berkoalisi dengan Golkar.

Kemudian pada Pemilu Presiden tahun 2009, PDI-P kembali mengajukan Megawati sebagai kandidat Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dari partai Gerindra, namun lagi-lagi hasil pemilu dimenangkan oleh partai Demokrat dengan pasangan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden. Dan sampai saat ini PDI-P merupakan satu-satunya partai yang enggan berkoalisi dengan partai Demokrat dan memilih menjadi partai oposisi tunggal di parlemen.

Dengan sikap politik seperti ini maka PDI-P merupakan partai yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat menengah kebawah. Karena hal ini sesuai dengan inti dari partai yang dikenal dengan partainya yang cilik

PDI-P sebagai partai ideologis yang memperjuangkan ajaran-ajaran politik Bung Karno menetapkan Pancasila 1 juni sebagai ideologi partai. Dengan demikian PDI-P memiliki konsekuensi bahwa *positioning* PDI-P berbeda dengan partai-partai politik yang lain, karena partai ini berangkat dari kesadaran historis, kesadaran ideologis, dan kesadaran politik. Partai ini merupakan salah satu partai yang telah lama eksis dalam percaturan politik nasional. Partai ini juga telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam rangka memantapkan keberadaan peran dan fungsi PDI-P ditengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan rakyat, maka untuk mewujudkan cita-cita itu, PDI-P telah berketetapan menjadikan dirinya menjadi partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI-P dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui Kongres partai. Kebangsaan

...mencakupkan prinsip "kerakyatan-kerakyatan" yang mengalauki adanya kesamaan

hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali, sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI-P prinsip ini menemukan bentuk kongkretnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI-P untuk senantiasa mengarahkan semua aktivitas bagi kepentingan rakyat banyak.

B. Konflik Internal PDI-P

Setelah melewati berbagai macam rintangan dalam perjuangan melawan dan menghadapi tekanan-tekanan yang datang bertubi-tubi pada masa Orba, konflik internal mulai muncul yang mengakibatkan timbulnya perpecahan di tubuh PDI-P. Pasca Kongres PDI-P di Bali tahun 2005 terjadi perbedaan pendapat dan ketidak sepahaman antara sekelompok orang, termasuk diantaranya Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis yang tidak sependapat dengan keputusan hasil Kongres tersebut. Kelompok tersebut menganggap penentuan metode demokratis yang berlaku di partai terbilang terpaku pada keputusan ketua umum.⁷⁵

Mereka yang berbeda pendapat tersebut menganggap bahwa PDI-P sebagai partai politik yang modern masih menggunakan metode lama yang otoriter, seperti memberikan hak istimewa mutlak kepada ketua umum partai dan hanya memiliki satu kandidat atau calon tunggal untuk posisi-posisi senior.⁷⁶ Terkait hal tersebut, mereka juga mengingatkan bahwa Soeharto

⁷⁵ *Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)*, diakses tanggal 2 Desember 2013, dari:

sebagai presiden dahulu bersama-sama dikoreksi untuk tidak boleh mempunyai kekuasaan mutlak, tetapi di partai masih dipraktikkan hal semacam itu.⁷⁷ Pada akhirnya, kelompok yang berbeda pendapat tersebut dipecat dari PDI-P karena dianggap melakukan tindakan indisipliner dan pelanggaran berat karena menolak hasil Kongres. Kelompok-kelompok yang dipecat tersebut adalah Arifin Panigoro, Postdam Hutasoit, Tjiandra Wijaya, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Pius Lustrilanang, Noviantika Nasution, Almarhum Sukowaluyo Mintorahardjo, Didi Supriyanto, Almarhum Sophan Sophiaan, Pieters Sutanto, dan Angelina Pattiasina. Kemudian kelompok yang dipecat tersebut membentuk partai baru dengan nama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan tetap berazaskan Pancasila.⁷⁸ Pendukung pembentukan PDP ini di dukung juga oleh Eksekutif PDI-P antara lain Abdul Madjid, Almarhum Roeslan Abdul Gani, RO Tambunan dan Petrus Salestinus. Hingga akhirnya eksekutif PDI-P yang mendukung PDP tersebut turut dipecat.⁷⁹

Melalui partai baru tersebut, mereka berusaha menuangkan pandangan perubahan yang mereka anggap sebagai penyempurna dan pengembangan dari gerakan pembaharuan dari PDI-P yang mereka kenal otoriter. Dimana PDP nantinya akan meninggalkan tradisi lama dalam perpolitikan nasional, yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan seperti kolektifitas kepemimpinan yang menjadi ciri sebuah partai modern, dan

⁷⁷ *Partai Demokrasi Pembaruan*, diakses tanggal 2 Desember 2013, dari: <http://www.pemiluindonesia.com/parpol/partai-demokrasi-pembaruan.html>

⁷⁸ *Didi Supriyanto Pejuang Demokrasi Tangguh*, diakses tanggal 2 Desember 2013, dari: <http://www.pemiluindonesia.com/parpol/partai-demokrasi-pembaruan.html>

menjauhkan partai dari pembajakan satu pihak yang dominan dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Dalam perjalanannya, PDP justru mengalami dualisme antara Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis. Keduanya saling mengklaim bahwa PDP merupakan buah hasil dari individu salah satu dari mereka. Hingga saat ini dualisme masih menyelimuti PDP. Bahkan kekisruhan antara dualisme tersebut semakin memanas ketika PDP kubu Roy B.B Janis dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU. Sehingga membuat PDP kubu Laksamana Sukardi mengecam dan melakukan protes keras serta meminta KPU untuk membatalkan verifikasi PDP yang diajukan kubu Roy B.B. Janis.⁸⁰

C. Perspektif dan Program Partai

Arah politik dan program PDI-P pertama-tama adalah menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa, yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya, serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bertanggung jawab, berkeadilan, bersih dan berwibawa. Penuntasan KKN dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip keseimbangan dan kesetaraan, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI-P yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI-P.

⁸⁰ *Kubu Laksamana Sukardi Kecam Menkumham-KPU Loloskan PDP*, diakses tanggal 2

D. Doktrin perjuangan

PDI-P memiliki doktrin perjuangan partai yaitu *Trias Dinamika Partai*, yang merupakan landasan juang yang progresif dan dilengkapi dengan *Dasa Prasetya* yang merupakan arah umum program yang progresif. *Trias Dinamika Partai* adalah tiga aktifitas kerja partai yang berurutan, bertahap dan berkelanjutan untuk mendinamisir partai. Tiga aktivitas tersebut adalah pemetaan wilayah politik, penempatan kader, dan membumikan kinerja partai. Tujuan dari *Trias Dinamika Partai* adalah:

1. Menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 menjadi program riil yang bermanfaat untuk rakyat.
2. Melaksanakan fungsi-fungsi kepartaian, yaitu agregasi aspirasi, artikulasi aspirasi, pendidikan politik, dan mempersiapkan pemimpin.
3. Menempuh jalan kepartaian menuju kemenangan pemilu 2014.

Trias Dinamika Partai ini memiliki jenjang yang mengikat. Maksud dari jenjang tersebut adalah basis wilayah penerapan *Trias Dinamika Partai*, yaitu wilayah politik partai tingkat cabang, yang dalam pelaksanaan kerjanya dibagi berdasarkan struktur pemerintahan hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Dalam hal ini Dewan Pimpinan Partai memberikan penghargaan atau sanksi kepada kader-kader yang bertugas, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja partai yang dilakukan secara berjenjang mulai dari

sanksi dilakukan dengan merujuk pada hak dan kewajiban anggota serta termasuk juga disiplin dan sanksi partai dalam AD/ART Partai.

Sedangkan Dasa Prasetia merupakan arah umum perjuangan Partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetiya berarti sepuluh janji kesetiaan, Berisi 10 (sepuluh) butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan Rakyat, yaitu sebagai berikut:

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang Secara konsisten.
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata

perintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.

Doktrin perjuangan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen yang tercakup dalam tiga pilar partai pada semua tingkatan di seluruh wilayah NKRI. Seluruh komponen partai (kader komunitas juang, kader legislatif, dan kader eksekutif yang dipimpin oleh struktural partai) harus bergerak secara integratif sesuai dengan jenjang, fungsi dan tugas masing-masing.

E. Tujuan, Fungsi dan Tugas Partai

D.1. Tujuan

Dalam Piagam Perjuangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI-P ada dua jenis tujuan perjuangan partai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.

b. Tujuan Khusus

1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis.
3. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang peduli rakyat atau partai yang selalu mengorbankan kepentingan rakyat dengan status sosial menengah kebawah sehingga partai ini dikenal dengan sebutan partainya wong cilik. Hal ini merupakan bagian dari strategi partai yang baik dalam mencari dukungan atau massa. Keputusan seperti ini sesuai dengan konteks status sosial masyarakat Indonesia, dimana masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan masyarakat golongan menengah keatas. Apabila

PDI-P bisa memanfaatkan potensi ini dengan baik maka dukungan besar akan mudah diraih.

PDI-P juga merupakan partai yang menjunjung tinggi perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya dan lain sebagainya yang kemudian disatukan kedalam satu naungan Pancasila sesuai dengan ideologi partai. Hal ini juga merupakan langkah yang baik untuk mencari dukungan mengingat masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik terutama dalam hal agama dan suku.

D.2. Fungsi Partai

1. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa
2. Membidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
3. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila
5. Melaksanakan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara

D.3. Tugas Partai

1. Menetapkan dan meniadakan cita-cita negara

2. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
3. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai
4. Memperjuangkan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara
5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁸¹

F. Visi dan Misi PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan partai. Maka dari itu PDI-P mempunyai visi dan misi yang terus-menerus melakukan perubahan yang mengarah/memihak terhadap rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Adapun visi dan misi PDI-P adalah sebagai berikut:

⁸¹ Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PDI-P. Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan, 2019, hal. 21-22.

E.1. Visi

Visi PDI-P adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat yang terdapat pada pasal 6 Anggaran Dasar Partai, visi PDI-P adalah:

1. Terwujudnya cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
2. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, demokratis, adil dan makmur.

E.2. Misi

Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atau keberlangsungan eksistensi partai sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar PDI-P, yaitu:

1. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
2. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan

3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
4. Menghimpun, merumuskan dan mem perjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
5. Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis.
6. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
7. Membentuk dan membangun karakter bangsa.
8. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
9. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
10. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam NKRI.
11. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
12. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

13. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

G. Platform PDI-P

Platform program yang progresif perlu dilengkapi dengan arah umum program perjuangan partai, yang menjadi penuntun bagi struktural partai disemua tingkatan dalam merumuskan *solusi programatik* bagi permasalahan rakyat. Arah umum program perjuangan ini sekaligus juga menjadi pedoman untuk mengukur kinerja kader dalam Tiga Pilar Partai (eksekutif, legislatif, dan struktural), sehingga Dewan Pimpinan Partai dapat menentukan pemberian penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*) dalam takaran yang tepat kepada kader yang layak menerimanya.

Oleh karena, Kongres sebagai forum tertinggi partai yang merupakan perwujudan kedaulatan anggota partai, memandang perlu untuk merumuskan platform program yang progresif, dengan nama TRIAS DINAMIKA PARTAI, dan arah umum program yang progresif dengan nama DASA PRASETYA.

1. Ideologi Partai

Semenjak didirikannya PDI-P sampai sekarang partai ini selalu konsisten dengan aliran politik dan ideologi politik yang diperjuangkan seperti yang tertuang dalam piagam perjuangan dan tertulis dalam AD/ART yang ada di dalam

buku partai PDI-P yaitu menegaskan pilihan jalan ideologi partai berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.

Ketegasan terhadap pilihan jalan tunggal ideologis yang memihak rakyat kecil tersebut sangat penting bagi masa depan PDI-P. Pertama, jalan ideologi yang berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 yang mengedepankan pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Kedua, gotong royong sebagai budaya kerja menjadi ciri bangunan kekuatan kolektif partai. Ketiga, mengelola partai yang identik dengan pengelolaan negara menugaskan partai untuk memperjuangkan kebijakan politik-politik partai menjadi kebijakan negara dengan menjadikan rakyat sebagai satu-satunya sumber inspirasi perjuangan partai.

Keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai telah mengatur mekanisme koordinasi antara tiga pilar partai yaitu: struktural partai, legislatif dan eksekutif. Kelima, sikap politik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan program partai merupakan satu kesatuan guna memastikan pelaksanaan jalan kerakyatan partai.

2. Sikap politik partai

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional

(PDI Perjuangan) PDI Perjuangan di Denpasar Bali tanggal 6-9 April

2010 menghasilkan sembilan rekomendasi yang mengkritisi program-program pemerintah berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan terutama dalam hal: kedaulatan NKRI, sumberdaya alam, hukum, politik, sosial, pendidikan, perempuan dan anak, keuangan negara dan ekonomi.⁸²

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat pada AD/ART partai yang tercantum dalam bab IV tentang organisasi, khususnya dimuat dalam pasal 19 tentang pengambilan keputusan. Adapun poin-poin pada pasal 19 tentang pengambilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Sidang/Rapat Partai di semua tingkatan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
2. Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.

Disamping ketentuan tersebut diatas, PDI-P memiliki ketentuan khusus yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan yaitu ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi partai. Adapun ketentuan khusus tersebut termuat dalam AD/ART PDI-P pada pasal 24 yang berisi sebagai berikut:

“Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan untuk mempertahankan: Eksistensi Partai, Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kepada Ketua Umum diberikan kewenangan sepenuhnya (Hak Prerogatif) untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan”.

I. Struktur Organisasi

I.1. Struktur Wilayah Kerja

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada ditingkat nasional atau meliputi wilayah NKRI.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan ditingkat provinsi.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan di daerah tingkat kabupaten/kota.
4. Pengurus Anak Cabang (PAC), ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan ditingkat kecamatan.
5. Pengurus Ranting, ialah kesatuan anggota, organisasi dan kepemimpinan ditingkat kelurahan.

6. Anak Ranting (AR), ialah kesatuan anggota ditingkat RW/RT.

I.2. Struktur Kekuasaan

1. Kongres

Kongres adalah permusyawaratan tertinggi dalam partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat, dan dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang diikuti oleh peserta kongres, peninjau dan undangan kongres.

2. Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah atau yang biasa disingkat Musda adalah permusyawaratan ditingkat daerah dalam partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musda, peninjau dan undangan.

3. Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang atau biasa disingkat Muscab adalah permusyawaratan ditingkat kabupaten/kota dalam partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta Muscab, peninjau dan undangan.

I.3. Struktur dan Jenjang Kepengurusan

1. Ketua Umum

Dalam melaksanakan kepemimpinannya ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk membina partai secara utuh kedalam dan keluar, menjaga eksistensi dan ideologi partai, melakukan penggantian Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai kebutuhan.

2. Ketua–Ketua Bidang Internal

Ketua–ketua bidang internal bertugas menyusun konsep kebijakan strategis partai yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penguatan partai serta menangani fungsi dan masalah internal partai. bidang–bidang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

➤ Bidang Kehormatan

Memiliki kualifikasi kader utama partai yang bertugas pro aktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra partai.

➤ Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Bertugas menyusun garis politik partai pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan komunikasi dengan berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain–

- Bidang Kaderisasi, Bidang Keanggotaan dan Bidang Rekrutmen

Bidang ini mengemban tugas melakukan penerimaan anggota baru, pendataan dan klarifikasi data anggota, pemetaan anggota, mengkoordinasikan, melakukan rekrutmen, pelatihan dan pendidikan kader, melakukan monitoring dan evaluasi kader partai serta menugaskan kader dan generasi kader.

- Bidang Organisasi

Bertugas menata dan menetapkan mekanisme organisasi, mengembangkan organisasi sayap, mengembangkan hubungan dengan berbagai organisasi.

- Bidang Informasi dan Bidang Komunikasi

Bertugas mengembangkan sistem informasi dan komunikasi partai yang menjaga dan memelihara komunikasi kedalam dengan struktur partai, badan-badan partai dan anggota, serta komunikasi keluar untuk mengembangkan hubungan dengan media, penggalangan opini dan penciptaan isu.

- Bidang Sumber Daya dan Dana

Menciptakan sumberdaya keuangan, logistik dan fasilitas partai melalui bidang-bidang usaha partai yang sah

untuk pembiayaan program partai yang tidak betentangan dengan undang-undang.

3. Ketua-Ketua Bidang Program

Ketua-ketua bidang program bertugas menangani program partai dalam bidang kehidupan masyarakat, menyusun konsep strategis kebijakan partai yang akan dilaksanakan oleh internal partai untuk membantu kehidupan masyarakat dan diperjuangkan menjadi kebijakan lembaga pemerintahan seperti:

➤ Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Bertugas menyusun kebijakan strategis partai yang menyangkut: politik pembangunan pertanian dan perikanan dalam rangka mewujudkan pertanian yang modern dan tangguh, mandiri dan berdaulat dibidang pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Politik membangun kelautan dalam rangka mewujudkan kelautan yang modern dan tangguh, mandiri dan berdaulat dibidang pangan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

➤ Kesehatan dan Tenaga Kerja

Menyusun kebijakan strategis partai yang menyangkut: politik pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan

dan tenaga kerja yang modern dan tangguh bagi seluruh

masyarakat. Politik menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta penghidupan yang layak bagi pekerja.

➤ Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan

Bidang ini bertugas menyusun kebijakan strategis partai yang menyangkut: politik membangun pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerukunan hidup beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

➤ Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi

Bertugas menyusun kebijakan partai yang menyangkut: politik yang membangun industri-madiri dengan meningkatkan perdagangan antar pulau dan internasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, politik membangun usaha kecil menengah yang didukung oleh fasilitas permodalan yang mencukupi dan pemasaran yang modern, politik membangun ekonomi nasional yang berlandaskan koperasi sebagai soko guru perekonomian.

➤ Pemuda dan Olahraga

Politik membangun generasi muda yang berwatak patriotis dan berjiwa kebangsaan dalam rangka pembentukan kader bangsa.

➤ Perempuan dan Anak

Menyusun kebijakan politik partai yang menyangkut politik pemberdayaan perempuan dan anak serta masalah kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Ketua–Ketua Bidang Lembaga Pemerintahan

Merupakan ketua bidang program yang bertugas menangani program partai dalam bidang pemerintahan seperti:

- Transportasi, Infrastruktur dan Perumahan
- Energi, Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- Kehutanan dan Perkebunan
- Keuangan dan Perbankan
- Hukum Ham dan Perundang–Undangan
- Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Pertahanan, Keamanan dan Hubungan Internasional

5. Sekjen dan Wakil Sekretaris Jendral

Sekretaris jendral bertugas dan bertanggung jawab dalam

menelola administrasi dan manajemen DPP partai. Sedangkan

wakil sekretaris jendral bertugas membantu sekretaris jendral sesuai dengan bidang masing-masing.

6. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum

Bendahara umum umum bertugas dan bertanggung jawab mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan partai. Dan wakil bendahara umum bertugas dan bertanggung jawab membantu bendahara umum sesuai dengan bidang masing-masing.

7. Majelis Ideologi

Majelis ideologi bertugas mengawasi kebijakan partai agar tidak keluar dari ideologi partai dan mempertahankan eksistensi partai. Majelis ini terdiri dari tujuh orang yang dipilih dan dipimpin oleh ketua umum DPP partai dan beranggotakan dari unsur DPP beserta tokoh partai.

8. Departemen-departemen

Departemen-departemen yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tugas bidang, departemen sebagai unsur staf bertugas sebagai penghimpun dana pengelola informasi data dan menyusun rancangan kebijakan, program, aksi dan solusi yang disampaikan kepada ketua bidangnya.

9. Ketua DPP

Bertugas menjalankan tugas harian kepengurusan, fungsi dan tugas partai ditingkat pusat. Bertanggung jawab atas eksistensi program dan kinerja partai.

10. Ketua DPD dan Ketua DPC

Ketua DPD dan ketua DPC bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi program dan kinerja partai baik yang kedalam maupun yang keluar wilayahnya.

11. PAC, Ranting dan Anak Ranting

Bertanggung jawab atas eksistensi program dan kinerja dari DPP, DPD dan DPC.

I.4. Susunan Pengurus DPP PDI-P Masa Bhakti 2010– 2015

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jendral : Tjahjo Kumolo

Wakil Sekjen Bidang Internal : Eriko Sotarduga

Wasekjen Program : Achmad Basarah

Wasekjen Kesekretariatan : Hasto Kristiyanto

Bendahara Umum : Olly Dondokambey

Bidang Internal : Rudianto Tien

Bidang Program	: Juliari Peter Batubara
Ketua Bidang Kehormatan	: Sidharto Danusubroto
Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga	: Puan Maharani, S.S
Ketua Bidang Keanggotan, Kaderisasi dan Rekrutmen	: Idham Samawi
Ketua Bidang Organisasi	: Drs. Djarot Saiful Hidayat MS
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi	: Rano Karno
Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana	: Drs. Effendi MS Simbolon, Msi
Ketua Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan	: Ir. Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja	: dr. Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan	: Prof. Hamka Haq
Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi	: Ir. Nusyirwan Soejono
Ketua Bidang Perempuan dan Anak	: Dra. Irianti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	: Masyarun Sirait

Ketua Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Transportasi : Drs. I Made Urip

Ketua Bidang Energi dan Pertambangan : Ir. Bambang Wuryanto

Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan : Ir. M. Prakosa

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan : Ir. Emir Moeis

Bidang Hukum, HAM dan Peraturan dan Perundangan : Trimedya Panjaitan, SH, MH

Ketua Bidang Pertahanan dan Hubungan Internasional : Dr. Andreas Hugo Pareira

Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah : Komaruddin Watubun

Sumber : www.pdi-perjuangan.org